

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2018 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2018 yang melibatkan seluruh bidang/bagian Dinas Perhubungan Kota Depok. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja dalam Dokumen Penetapan Kinerja Perubahan (TAPKIN Perubahan) dengan hasil Pengukuran Kinerja (PK).

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Perubahan (RKT Perubahan) Tahun 2018 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang harus dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Depok. Rata-rata capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan menunjukkan prosentase capaian kinerja sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI	CAPAIAN	
	1	Nilai evaluasi SAKIP	Nilai	B	B	100%
	2	Survey Kepuasan Masyarakat Secara Mandiri	Nilai	baik	baik	100%
	3	Persentase panjang jalan di Kota Depok terlayani PJU	Persentase	4,31%	36,09%	837,35%
	4	Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum	Persentase	98%	99%	101,02%
	5	Jumlah terminal terpelihara secara layak	Lokasi	2	2	100%
	1	Kecepatan rata-rata jalan kota	km/jam	20 km/jam	35,06 km/jam	175.3%
	2	Persentase menurunnya tingkat kecelakaan	Persentase	4.44%	2,3%	193%
	3	Modal share transportasi umum	Persentase	26.75 %	21,80%	81.50%

Dari 2 (dua) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2018, 2 (dua) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja memperoleh capaian kinerja  $\geq 100\%$ .



Berdasarkan APBD Perubahan Kota Depok Tahun Anggaran 2018, diketahui bahwa Total Anggaran Belanja Dinas Perhubungan Kota Depok adalah sebesar Rp. 75.894.645.934,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 15.342.831.638,- dan untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 60.551.814.296,- sedangkan untuk Realisasi Belanja sebesar Rp.65.473.705.107,- (86,27%) yang terdiri dari Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 14.019.503.405,- (91,37%) dan Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 51.454.201.657,- (84,97%).

Depok, Januari 2019

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA DEPOK**

**Drs. Dadang Wihana, M.Si**  
NIP. 197204081990111001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam organisasi pemerintahan, Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selanjutnya secara implementatif untuk mengatur hal dimaksud diterbitkan regulasi berupa Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan LAKIP Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2018 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Rencana Strategis (Renstra) Perubahan 2016 - 2021, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2018 menjadi laporan keberhasilan/ kegagalan penyelenggaraan organisasi dan telah disusun dan dikembangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan LAKIP Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

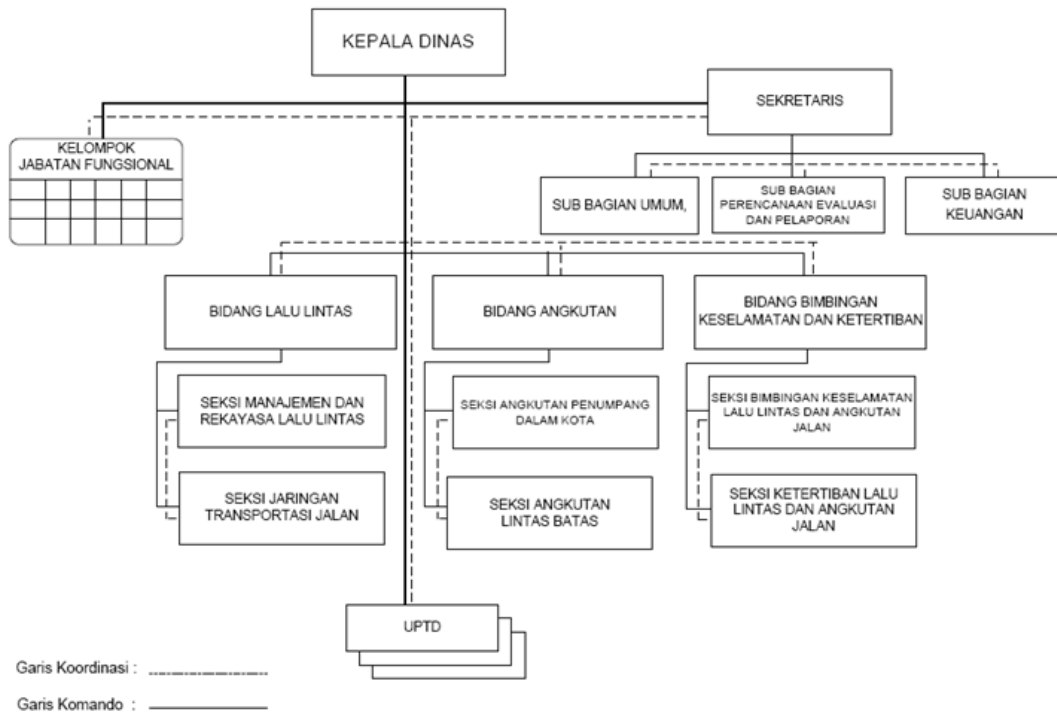
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## 1.3 Tugas dan Fungsi

Dinas Perhubungan Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah yang ditegaskan dalam Peraturan Walikota Depok nomor 113 tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan Kota Depok mempunyai Fungsi sebagai lembaga pemerintahan yang membantu Walikota Depok dalam bidang perhubungan dalam bentuk:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah kota;
3. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Depok terdiri dari:



#### 1.4 Permasalahan Utama

Dalam mencapai target kinerja, permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Depok adalah sebagai berikut :

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
<b>UPT PKB</b>					
Sumber Daya Manusia Pengujian	Masih berjalan sesuai dengan SOP tetapi belum mencapai target	UU Nomor 22 Tahun 2009 Permenhub no 156 tahun 2016 tentang kompetensi penguji berkala kendaraan bermotor	Penempatan pegawai sesuai kompetensi	Terkait penambahan SDM tidak mempunyai kewenangan	Pelayanan kepada masyarakat kurang optimal
Sarana Prasarana	Keadaan alat penunjang kerja belum optimal	UU Nomor 22 Tahun 2009 Permenhub NO 133 Tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor	Baru dianggarkan di Tahun Anggaran 2019	Terkait persetujuan Anggaran dari TAPD	Pelayanan kepada masyarakat kurang optimal

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
	Gedung Pelayanan kurang memadai	UU Nomor 22 Tahun 2009 Permenhub NO 133 Tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor	Belum diusulkannya Anggaran	Terkait persetujuan Anggaran dari TAPD	Pelayanan kepada masyarakat kurang optimal
<b>UPT Terminal</b>					
Sumber Daya Manusia	Masih berjalan sesuai dengan SOP tetapi belum tercapai sesuai target	UU Nomor 22 Tahun 2009	Penempatan pegawai sesuai kompetensi	Terkait penambahan SDM tidak mempunyai kewenangan	Pelayanan kurang optimal
Sarana prasarana	Keadaan alat penunjang kerja belum optimal	UU Nomor 22 Tahun 2009	Belum bisa dianggarkan	Terkait persetujuan Anggaran dari TAPD	Pelayanan kurang optimal
	Gedung Pelayanan belum selesai pembangunan	UU Nomor 22 Tahun 2009	Belum bisa dianggarkan	Bangun Guna Serah	Terbatasnya pengalokasian anggaran karena asset terminal telah dikerjasamakan
	Sarpras Gedung kurang memadai	UU Nomor 22 Tahun 2009	Belum bisa dianggarkan	Bangun Guna Serah	Terbatasnya pengalokasian anggaran karena asset terminal telah dikerjasamakan
<b>UPT PJU</b>					
	Belum Optimalnya Penerangan Jalan Umum	UU Nomor 23 Tahun 2014	Kurangnya alokasi anggaran	Terkait persetujuan Anggaran dari TAPD	Pelayanan kurang optimal
	Kurang memadainya Gudang untuk penyimpanan barang pemeliharaan	UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 25 ayat 1.0	Belum teranggarkan	Terkait persetujuan Anggaran dari TAPD	Pelayanan kurang optimal
Sumber Daya Manusia	Belum optimalnya Pengawasan penerangan jalan umum	3 SHI 7391 ; 2008 SDM PermenpanRB Nomor 25 tahun 2016 lampiran nomor 20	Penempatan pegawai sesuai kompetensi	Terkait penambahan SDM tidak mempunyai kewenangan	Masih adanya pengaduan masyarakat mengenai PJU

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
<b>Bidang Lalu Lintas</b>					
Sarana Prasarana Lalu Lintas	Kuantitas : kurang Kualitas : perlu peningkatan	UU Nomor 22 Tahun 2009 Permenhub Nomor 11 Tahun 2018	Keterbatasan Anggaran	Terkait persetujuan Anggaran dari TAPD	Masih rendahnya kinerja jaringan jalan
SDM	Kuantitas : kurang Kualitas : perlu peningkatan	Permenhub Nomor 75 Tahun 2015 jo Permenhub Nomor 11 Tahun 2018	Keterbatasan Anggaran	Terkait penambahan SDM tidak mempunyai kewenangan	Terhambatnya layanan bidang lalu lintas
Regulasi	Belum terakomodirnya SOP Rekomendasi Andall dan perlengkapan jalan	Permenhub Nomor 75 Tahun 2015 jo Permenhub Nomor 11 Tahun 2018 dan Perda Nomor 2 Tahun 2009	Belum adanya usulan Rancangan Peraturan Walikota	Terkait koordinasi dengan Bagian Hukum	Terhambatnya layanan penerbitan rekomendasi Andall dan Usulan perlengkapan jalan
<b>Bidang Angkutan</b>					
Layanan Perijinan	Saat ini perijinan trayek masih dilayani bidang angkutan	UU Nomor 22 Tahun 2009	Sudah ada usulan terkait dengan pemindahan pelayanan	DPM-PTSP harus menyiapkan	Legalitas perijinan angkutan
Sarpras Perijinan Angkutan	Sistem IT masih bersifat local	UU Nomor 22 Tahun 2009	Pembangunan system terintegrasi data	Diskominfo menyiapkan Server	Informasi layanan konsumen masih kurang up to date
Modal share	Faktor muat masih kecil	UU Nomor 22 Tahun 2009	Sudah adanya studi angkutan umum massal	Kordinasi dengan Pemerintah Pusat	Kurang populernya angkutan umum dan maraknya angkutan berbasis online
<b>Bidang Bimkestib</b>					
Pelayanan	Belum optimalnya SDM dan Sarpras Penunjang	UU Nomor 22 Tahun 2009	Pengalokasian Sumber Daya dan Sarpras	Support Personil Kepolisian Belum Optimal	Masih belum optimalnya pengaturan lalu lintas
Perparkiran	Masih belum optimal lahan parkir yang dikelola oleh Pemerintah Kota	UU Nomor 22 Tahun 2009	Kajian Parkir Baru Dianggarkan pada Anggaran Perubahan 2018	Peran Swasta belum dilibatkan dalam penyiapan parkir bersama	Terdapatnya parkir di badan jalan dan target retribusi parker belum mencapai

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
					target
Peningkatan kesadaran berlalu lintas	Belum Optimalnya sosialisasi yang dilakukan	UU Nomor 22 Tahun 2009	Terbatasnya Anggaran	Melibatkan pihak kepolisian dan dinas Pendidikan	Masih banyaknya pelanggaran lalu lintas
<b>Sekretariat</b>					
Proses Pencairan Keuangan	Masih sering terlambat dalam pencairan	Permenpan 53 tahun 2014	Melakukan evaluasi SDM	Melakukan konsultasi dan kordinasi dengan BKD	Kinerja belum optimal

### 1.5 Sistematika Penyajian

Substansi yang tercakup dalam LAKIP Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

#### IKHTISAR EKSEKUTIF

Menguraikan tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja, pencapaian kinerja sasaran, kendala dan hambatan, anggaran serta strategi pemecahan masalah.

#### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, tugas dan fungsi, permasalahan utama serta sistematika penyajian LAKIP Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2018.

#### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, kebijakan dan program. Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang menggambarkan tentang sasaran dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan serta program dan kegiatan yang harus dilaksanakan.



### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

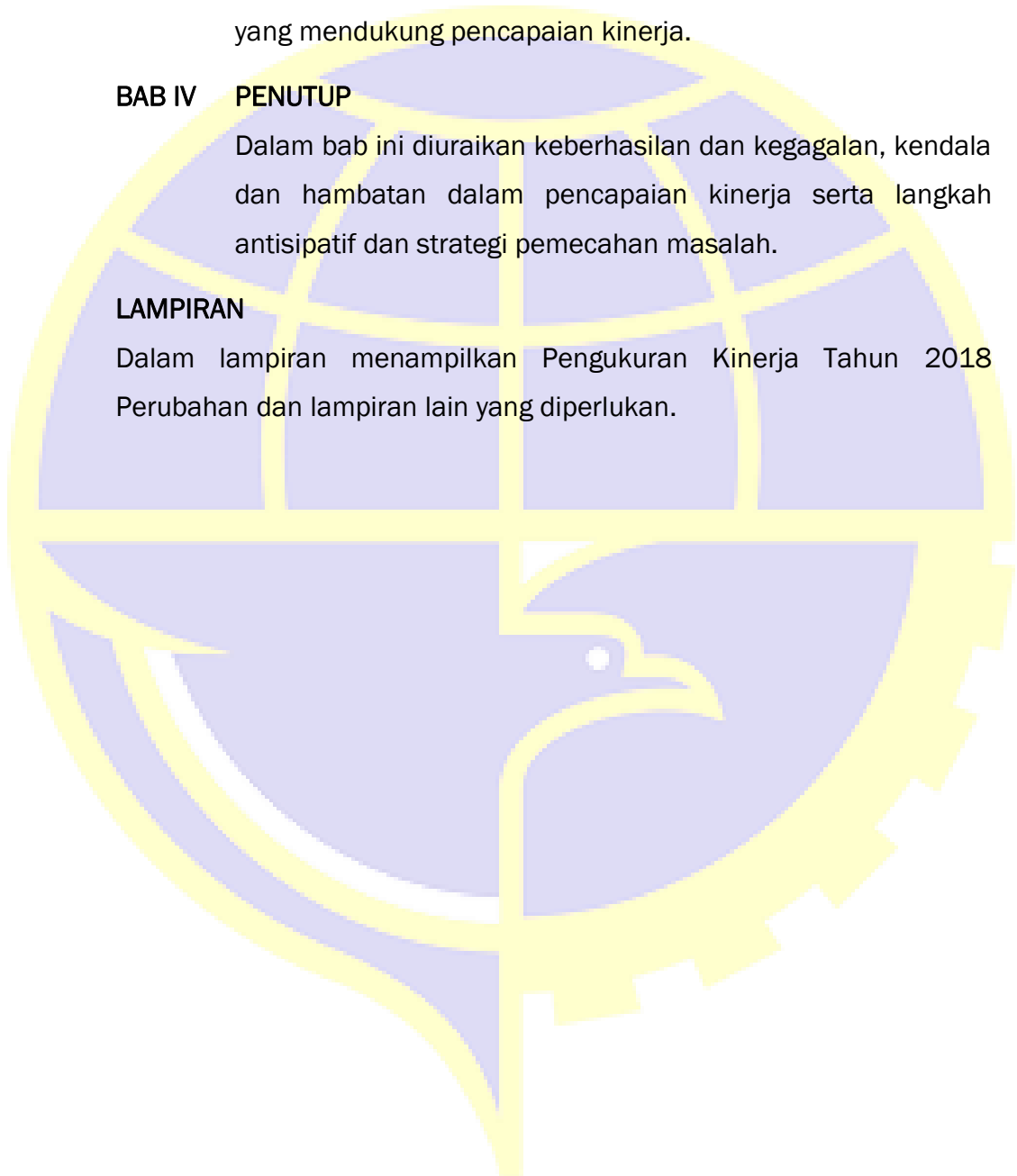
Dalam bab ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang terdiri dari capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian kinerja.

### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini diuraikan keberhasilan dan kegagalan, kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif dan strategi pemecahan masalah.

### **LAMPIRAN**

Dalam lampiran menampilkan Pengukuran Kinerja Tahun 2018 Perubahan dan lampiran lain yang diperlukan.



## BAB II

### PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis (RENSTRA)

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan. Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2016-2021 Perubahan merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Dinas Perhubungan Kota Depok disusun dari hasil penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 dan telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Depok. Dengan rincian sasaran dan indicator sebagai berikut :

##### a. Sebelum Reviu Menpan

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
		Modal share penggunaan angkutan umum
		Kecepatan rata rata kendaraan di jalan utama
		Rasio antara volume kendaraan terhadap kapasitas jalan pada jalan utama
		Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan pada jalan kota
		Tingkat layanan PJU
		Prosentase kendaraan tertib perijinan
		Prosentase kendaraan lulus pengujian kendaraan bermotor

## a. Setelah Reviu Menpan

URAIAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA
		Nilai evaluasi SAKIP
		Survey Kepuasan Masyarakat Secara Mandiri
		Persentase panjang jalan di Kota Depok terlayani PJU
		Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum
		Jumlah terminal terpelihara secara layak
		Kecepatan rata-rata jalan kota
		Persentase menurunnya tingkat kecelakaan
		Modal share transportasi umum

**2.2 Perjanjian Kinerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Dokumen Perjanjian Kinerja disusun oleh setiap pimpinan instansi pemerintah dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supevisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2018 sebelum dan setelah reuiu adalah sebagai berikut :

**PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN SEBELUM REVIU MENPAN  
TAHUN 2018**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Modal share penggunaan angkutan umum	26,75%
		Kecepatan rata rata kendaraan di jalan utama	37,3 km/jam
		Rasio antara volume kendaraan terhadap kapasitas jalan pada jalan utama	0,72
		Tingkat ketersediaan perlengkapan jalan pada jalan kota	34,60%
		Tingkat layanan PJU	44,18%
		Prosentase kendaraan tertib perijinan	34,75%
		Prosentase kendaraan lulus pengujian kendaraan bermotor	99,89%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum	99,000,000.00	Mendukung/Berkaitan sasaran ke 1
Pengembangan Angkutan Umum	45,860,000.00	Mendukung/Berkaitan sasaran ke 1
Peningkatan Layanan Publik Bidang Perhubungan	41,866,464,496.00	Mendukung/Berkaitan sasaran ke 2
Pemanfaatan Teknologi Dalam Peningkatan Layanan Bidang Perhubungan	1,101,348,000.00	Mendukung/Berkaitan sasaran ke 2
Peningkatan Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas	13,852,584,000.00	Mendukung/Berkaitan sasaran ke 3

**PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN SETELAH REVIU MENPAN  
TAHUN 2018**

URAIAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
	1	Nilai evaluasi SAKIP	Nilai	B
	2	Survey Kepuasan Masyarakat Secara Mandiri	Nilai	baik
	3	Persentase panjang jalan di Kota Depok terlayani PJU	Persentase	4,31%
	4	Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum	Persentase	98%
	5	Jumlah terminal terpelihara secara layak	Lokasi	2
	1	Kecepatan rata-rata jalan kota	km/jam	20 km/jam
	2	Persentase menurunnya tingkat kecelakaan	Persentase	4.44%
	3	Modal share transportasi umum	Persentase	26.75%

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Peningkatan Administrasi Perkantoran	1,810,061,800	Mendukung/Berkaitan sasaran ke 1
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	650,600,000	Mendukung/Berkaitan sasaran ke 1

3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	40,000,000	Mendukung/Berkaitan sasaran ke 1
4	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	50,000,000	Mendukung/Berkaitan sasaran ke 1
5	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	1,035,896,000	Mendukung/Berkaitan sasaran ke 1
6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum	99,000,000	Mendukung/Berkaitan sasaran ke 2
7	Pengembangan Angkutan Umum	45,860,000	Mendukung/Berkaitan sasaran ke 2
8	Peningkatan Layanan Publik Bidang Perhubungan	41,866,464,496	Mendukung/Berkaitan sasaran ke 1 dan 2
9	Pemanfaatan Teknologi Dalam Peningkatan Layanan Bidang Perhubungan	1,101,348,000	Mendukung/Berkaitan sasaran ke 1 dan 2
10	Peningkatan Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas	13,852,584,000	Mendukung/Berkaitan sasaran ke 1 dan 2
<b>JUMLAH</b>		<b>60,551,814,296</b>	

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

##### 3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Perubahan (RKT Perubahan) Tahun 2017 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Depok mengacu kepada Rencana Strategis 2016-2021 Perubahan terkait kepada Sasaran. Rata-rata capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan menunjukkan prosentase target capaian kinerja sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI	CAPAIAN	
	1	Nilai evaluasi SAKIP	Nilai	B	B	100%
	2	Survey Kepuasan Masyarakat Secara Mandiri	Nilai	baik	baik	100%
	3	Persentase panjang jalan di Kota Depok terlayani PJU	Persentase	4,31%	36,09%	837,35%
	4	Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum	Persentase	98%	99%	101,02%
	5	Jumlah terminal terpelihara secara layak	Lokasi	2	2	100%
	1	Kecepatan rata-rata jalan kota	km/jam	20 km/jam	35,06 km/jam	175.3%
	2	Persentase menurunnya tingkat kecelakaan	Persentase	4.44%	2,3%	193%
	3	Modal share transportasi umum	Persentase	26.75 %	21,80%	81.50%

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2018 secara umum telah memenuhi harapan.

### 3.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu

#### Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja 2017

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
	Nilai evaluasi SAKIP	B	B
	Survey Kepuasan Masyarakat Secara Mandiri	baik	baik
	Persentase panjang jalan di Kota Depok terlayani PJU	4,31%	5,74%
	Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum	98%	99,37%
	Jumlah terminal terpelihara secara layak	2	2
	Kecepatan rata-rata jalan kota	18 km/jam	31,24 km/jam
	Persentase menurunnya tingkat kecelakaan	4.54%	3,95%
	Modal share transportasi umum	25.01%	18,24%

#### Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja 2018

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
	Nilai evaluasi SAKIP	B	B
	Survey Kepuasan Masyarakat Secara Mandiri	baik	baik
	Persentase panjang jalan di Kota Depok terlayani PJU	4,31%	36,09%
	Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum	98%	99%
	Jumlah terminal terpelihara secara layak	2	2
	Kecepatan rata-rata jalan kota	20 km/jam	35,06 km/jam
	Persentase menurunnya tingkat kecelakaan	4.44%	2,3%
	Modal share transportasi umum	26.75 %	21,80%

### 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota.

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Standar Pelayanan Minimal	Nilai	Indikator Kinerja Dinas Perhubungan	Target	Realisasi
1	Angkutan Jalan	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	60%	Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum	98%	99%
		Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	40%	Jumlah terminal terpelihara secara layak	2	2
		Fasilitas Perlengkapan Jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	33%	Persentase panjang jalan di Kota Depok terlayani PJU	4,31%	36,09%

Dari data tabel di atas bisa diketahui bahwa Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Depok yang memiliki hubungan keterkaitan dengan indikator standart pelayanan minimal adalah sebanyak 3 (tiga) indikator sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan.

### 3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pada Tahun 2018 Dinas Perhubungan Kota Depok telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Depok sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 yang berbunyi: **“Depok Unggul nyaman dan Religius”** yang mengacu kepada Misi Ke 4 Kota Depok yaitu

*“Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan, dan Ramah Keluarga”* dijabarkan sebagai berikut :

**Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja 2018**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN	
	1	Nilai evaluasi SAKIP	B	B	100%
	2	Survey Kepuasan Masyarakat Secara Mandiri	baik	baik	100%
	3	Persentase panjang jalan di Kota Depok terlayani PJU	4,31%	36,09%	837,35%
	4	Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum	98%	99%	101,02%
	5	Jumlah terminal terpelihara secara layak	2	2	100%
	1	Kecepatan rata-rata jalan kota	20 km/jam	35,06 km/jam	175.3%
	2	Presentase menurunnya tingkat kecelakaan	4.44%	2,3%	193%
	3	Modal share transportasi umum	26.75 %	21,80%	81.50%

**Sasaran 1** Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik dengan 5 (lima) indikator yang terdiri atas :

- 1. Nilai evaluasi SAKIP** dengan target Nilai B terealisasi dengan nilai B berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Depok.
- 2. Survey Kepuasan Masyarakat Secara Mandiri** dengan target kategori Baik terealisasi dengan kategori Baik berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat Secara Mandiri dengan kategori baik
- 3. Persentase panjang jalan di Kota Depok terlayani PJU** dengan target 4,31% terealisasi 36,09% yakni dari pemasangan PJU 1,08% dan pemeliharaan 35,01%. Walaupun ada kegiatan pemasangan yang gagal lelang, tetapi masih kegiatan pemeliharaan untuk memenuhi pelayanan PJU kepada masyarakat.
- 4. Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum** dengan Target 98% terealisasi 99% berdasarkan data dari UPTD Pengujian Kendaraan

Bermotor Tahun 2018 yakni dari jumlah 30.090 kendaraan umum yang uji KIR jumlah kendaraan tidak lulus uji KIR 298 kendaraan.

5. Jumlah terminal terpelihara secara layak dengan target 2 lokasi dan tercapai 2 lokasi yakni Terminal Depok dan sub terminal Sawangan.

**Sasaran 2** Meningkatnya kualitas layanan transportasi dengan 3 (tiga) indikator yang terdiri atas :

1. **Kecepatan rata-rata jalan kota** dengan target 20 km/jam dan terealisasi 35,06 km/jam berdasarkan hasil survey kinerja jaringan jalan di Kota Depok dengan perhitungan Jarak dibagi Waktu tempuh kendaraan.
2. **Presentase menurunnya tingkat kecelakaan** dengan target 4,44 dan terealisasi 2,3% berdasarkan data dari Polres Kota Depok selama tahun 2018, yakni dari Jumlah Korban yang Mati ditempat 5 orang dengan Jumlah Kecelakaan keseluruhan sebanyak 217 kejadian.
3. **Modal share transportasi umum** dengan target 26,75% dan terealisasi 21,80% berdasarkan hasil survey penggunaan angkutan umum oleh masyarakat dari total perjalanan masyarakat se-Kota Depok dengan perhitungan Jumlah perjalanan dibagi jumlah penumpang angkutan umum dikali 100%. Modal share tidak mencapai target karena terpuruknya angkutan umum karena adanya angkutan berbasis online yang lebih dipilih masyarakat.

### 3.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan analisis atas efisiensi pengguna sumberdaya pada Dinas Perhubungan Kota Depok diketahui bahwa terdapat 6 (enam) indikator kinerja yang mencapai targetnya dan realisasi anggaran cukup efisien dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2018	REALISASI	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE CAPAIAN ANGGARAN
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	1	Nilai evaluasi SAKIP	Nilai	B	B	Peningkatan Administrasi Perkantoran	1,810,061,800	1,712,311,424	94,60
		2	Survey Kepuasan Masyarakat Secara Mandiri	Nilai	baik	baik	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	650,600,000	636,585,805.00	97.85
		3	Persentase panjang jalan di Kota Depok terlayani PJU	Persentase	4,31%	36,09%	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	40,000,000	38,955,000.00	97.39
		4	Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum	Persentase	98%	99%	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00
		5	Jumlah terminal terpelihara secara layak	Lokasi	2	2	Peningkatan Layanan Publik Bidang Perhubungan	41,866,464,496	38,504,631,478	91,97
2	Meningkatnya kualitas layanan transportasi	1.	Kecepatan rata-rata jalan kota	km/jam	20 km/jam	35,06 km/jam	Pemanfaatan Teknologi Dalam Peningkatan Layanan Bidang Perhubungan	1,101,348,000	1,055,353,364	95,82
		2.	Presentase menurunnya tingkat kecelakaan	Persentase	4.44%	2,3%				

**3.6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

URAIAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2018	REALISASI	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE CAPIAN ANGGARAN
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	1.	Nilai evaluasi SAKIP	Nilai	B	B	<b>Peningkatan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.810.061.800</b>	<b>1.712.311.424</b>	<b>94.60</b>
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	399.960.000	348.271.969	
							Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	686.874.800	670.062.707	
							Penyediaan Alat Tulis Kantor	118.617.000	112.449.810	
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	120.000.000	119.808.570	
							Penyediaan Makanan dan Minuman	170.000.000	147.284.600	
							Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	314.610.000	314.433.768	
		2.	Survey Kepuasan Masyarakat Secara Mandiri	Nilai	Baik	Baik	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>650.600.000</b>	<b>636.585.805</b>	<b>97.85</b>
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	150.000.000	148.821.500	
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	100.000.000	98.496.069	
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100.000.000	99.399.636	



## LAKIP DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018 KOTA DEPOK

						Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya	200.600.000	190.686.000		
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	99.182.600		
		3.	Persentase panjang jalan di Kota Depok terlayani PJU	Persentase	4,31%	5,74%	<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>40.000.000</b>	<b>38.955.000</b>	<b>97.39</b>
						Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional	40.000.000	389.55.000		
		4	Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum	Persentase	98%	99,37%	<b>Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100</b>
						Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	50.000.000	50.000.000		
		5	Jumlah terminal terpelihara secara layak	Lokasi	2	2	<b>Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan</b>	<b>1.035.896.000</b>	<b>723.645.200</b>	<b>69.86</b>
						Penyusunan DED Meterisasi PJU	57.213.000	56.615.000		
						Surveillance ISO Perijinan Bidang Angkutan	100.000.000	97.400.000		
						Survey Kinerja dan Biaya Operasi Angkutan Penumpang Umum	125.000.000	0		
						Surveillance ISO PKB	49.900.000	48.000.000		
						Penyelenggaraan Forum OPD	30.000.000	30.000.000		
						Sertifikasi ISO PJU	49.733.000	36.120.000		
						Penyusunan DED JPO	149.050.000	0		
						Pelaksanaan Penilaian Lomba Tertib Lalu Lintas (Wahana Tata Nugraha)	100.000.000	90.734.200		
						Kajian Perparkiran Pasar	100.000.000	95.370.000		
						Survey Kinerja Jaringan Jalan	175.000.000	174.036.000		
						Kajian Perparkiran Kawasan	100.000.000	95.370.000		

2	Meningkatnya kualitas layanan transportasi	1.	Kecepatan rata-rata jalan kota	km/jam	18 km/jam	37,91 km/jam	<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum</b>	<b>99.000.000</b>	<b>82.000.000</b>	<b>82.83</b>
							Sewa Lahan Pangkalan Angkutan Umum	99.000.000	82.000.000	
		2.	Presentase menurunnya tingkat kecelakaan	Persentase	4,54%	3,95%	<b>Pengembangan Angkutan Umum</b>	<b>45.860.000</b>	<b>38.510.000</b>	<b>83.97</b>
							Sosialisasi Sistem Angkutan Umum Massal	45.860.000	38.510.000	
		3.	Modal share transportasi umum	Persentase	25,01%	18,24%	<b>Peningkatan Layanan Publik Bidang Perhubungan</b>	<b>41.866.464.496</b>	<b>38.504.631.478</b>	<b>91.97</b>
							Pelayanan Pengaturan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	325.000.000	239.168.400	
							Pelayanan Perizinan Angkutan	250.000.000	132.001.000	
							Pengadaan Cetak Stiker Angkutan Umum	146.000.000	95.005.000	
							Pembinaan Operator Angkutan Umum	124.600.000	123.125.000	
							Car Free Day	175.000.000	175.000.000	
							Pelayanan Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas	6.597.024.696	6.478.693.800	
							Pengadaan & Pemeliharaan Alat Komunikasi	110.000.000	107.334.000	
							Pengawasan Pimpinan Daerah	367.000.000	362.955.000	
							Pengelolaan Rutin dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Pengatur Lalu Lintas	561.000.000	432.957.350	
							Pengendalian dan Pembayaran Rekening Listrik	27.000.000.000	25.323.016.526	



## LAKIP DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018 KOTA DEPOK

					Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	89.800.000	83.115.000	
					Pengadaan Cetak Karcis Retribusi	150.400.000	148.620.000	
					Pelayanan UPTD PJU	598.000.000	363.186.316	
					Pelayanan UPTD PKB	2.367.867.000	2.056.806.900	
					Pelayanan UPTD Terminal Depok	604.926.000	41.3891.761	
					Penyediaan Jasa Kebersihan Terminal	729.706.800	710.266.800	
					Sosialisasi Andallalin	80.000.000	65.750.000	
					Pengadaan dan Pemasangan Gate Parkir	570.000.000	556.866.625	
					Penyediaan Jasa Pengaturan Terminal	940.140.000	559.250.000	
					Sosialisasi SSA	80.000.000	65.750.000	
					<b>Pemanfaatan Teknologi Dalam Peningkatan Layanan Bidang Perhubungan</b>	<b>1.101.348.000</b>	<b>1.055.353.364</b>	<b>95.84</b>
					Pemeliharaan ATCS	252.800.000	244.756.000	
					Pengadaan Kamera CCTV dan Audio Announcher	408.535.000	405.536.000	
					Pelayanan Informasi Perhubungan	23.000.000	11.018.364	
					Pengadaan dan Pemasangan SLS	417.013.000	394.043.000	
					<b>Peningkatan Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas</b>	<b>13.852.584.000</b>	<b>8.612.209.386</b>	<b>62.17</b>
					Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	379.950.000	311.670.000	
					Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	101.465.000	66.365.000	
					Sosialisasi Tertib Lalu Lintas	90.000.000	86.100.000	
					Pengadaan Pemasangan	399.800.000	379.744.000	





## LAKIP DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2018 KOTA DEPOK

						Marka Cold Plast			
						Pengadaan Pemasangan Kelengkapan Pengatur Lalu Lintas	354.594.000	348.396.500	
						Pengadaan dan Pemasangan Warning Light	176.800.000	173.915.000	
						Pemeliharaan Halte	99.900.000	985.46.000	
						Penertiban Parkir	131.045.000	130.785.000	
						Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan	300.000.000	297.289.100	
						Pengadaan Pemasangan Perlengkapan Jalan	399.820.000	395.078.400	
						Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas	200.000.000	198.222.000	
						Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan	402.360.000	400.367.000	
						Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Persimpangan	148.500.000	143.677.000	
						Pemeliharaan TL&WL	275.000.000	263.943.000	
						Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	881.850.000	855.288.221	
						Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	4.297.000.000	1.824.265.000	
						Pemasangan Penerangan Jalan Lingkungan	1.667.500.000	614.136.000	
						Pembangunan RW Terang	154.000.000	146.128.855	
						Pemeliharaan PJU	2.929.000.000	1.870.534.310	
						Rehabilitasi Jaringan PJU Bawah Tanah Margonda	464.000.000	7.759.000	

**a) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2018**

Adalah sebanyak 7 (tujuh) indikator yang terdiri atas :

1. Nilai evaluasi SAKIP mencapai kinerja kategori Nilai B (100%) yakni didukung oleh 2 (dua) program dan 2 (dua) kegiatan
2. Survey Kepuasan Masyarakat Secara Mandiri mencapai kinerja “Baik” (100%), yakni didukung oleh 5 (lima) program dan 13 (tiga belas) kegiatan.
3. Persentase panjang jalan di Kota Depok terlayani PJU mencapai kinerja 837,35% yakni didukung oleh 3 (tiga) program dan 11 (sebelas) kegiatan.
4. Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum mencapai kinerja 101,02% yakni didukung oleh 1 (program) program dan 4 (empat) kegiatan.
5. Jumlah terminal terpelihara secara layak mencapai kinerja 100% yakni didukung oleh 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan
6. Kecepatan rata-rata jalan kota mencapai kinerja 175,3% yakni didukung oleh 2 (dua) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan
7. Presentase menurunnya tingkat kecelakaan mencapai kinerja 193% yakni didukung oleh 2 (dua) program dan 13 (tiga belas) kegiatan

**b) Analisis Program/Kegiatan yang tidak/ kurang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2018 Adalah sebanyak 1(satu) indikator yang terdiri atas :**

1. Modal share transportasi umum mencapai kinerja 81,50% yakni didukung oleh 3 (tiga) program dan 7 (tujuh) kegiatan.

**B. REALISASI ANGGARAN**

Adapun realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

URAIAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE CAPIAN ANGGARAN	
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	1.	Nilai evaluasi SAKIP	Nilai	B	B	Peningkatan Administrasi Perkantoran	1.810.061.800	1.712.311.424	94.60
		2.	Survey Kepuasan Masyarakat Secara Mandiri	Nilai	baik	baik	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	650.600.000	636.585.805	97.85
		3.	Persentase panjang jalan di Kota Depok terlayani PJU	Persentase	4,31%	36,09%	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	40.000.000	38.955.000	97.39
		4.	Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum	Persentase	98%	99%	Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	50.000.000	50.000.000	100
		5.	Jumlah terminal terpelihara secara layak	Lokasi	2	2	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan	1.035.896.000	723.645.200	69.86
2.	Meningkatnya kualitas layanan transportasi	1.	Kecepatan rata-rata jalan kota	km/jam	20 km/jam	35,06 km/jam	Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum	99.000.000	82.000.000	82.83

	transportasi									
		2.	Presentase menurunnya tingkat kecelakaan	Persentase	4.44%	2,3%	Pengembangan Angkutan Umum	45.860.000	38.510.000	83.97
		3.	Modal share transportasi umum	Persentase	26.75 %	21,80%	Peningkatan Layanan Publik Bidang Perhubungan	41.866.464.496	38.504.631.478	91.97
							Pemanfaatan Teknologi Dalam Peningkatan Layanan Bidang Perhubungan	1.101.348.000	1.055.353.364	95.84
							Peningkatan Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas	13.852.584.000	8.612.209.386	62.17

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja

Dalam rangka mencapai kinerja sasaran Tahun 2018 Dinas Perhubungan Kota Depok telah melaksanakan Program dan Kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Depok. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja secara keseluruhan dari 2 (dua) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator, disimpulkan bahwa terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja yang mencapai 100% dan 1 (satu) indikator kinerja yang mencapai dibawah 100%.

#### 4.2. Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja

1. Modal share transportasi umum yang mencapai kinerja 21,80% karena adanya perubahan paradigma dan perubahan teknologi dari system transportasi konvensional ke system transportasi online. Selain itu masih minimnya system angkutan umum yang memadai yang bisa menarik masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan umum.

#### 4.3 Alternatif/ Solusi dalam menghadapi hambatan pencapaian kinerja

1. Melaksanakan reviu secara berjenjang atas dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kota Depok.
2. Perlu adanya kebijakan yang dapat mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum.
3. Berkoordinasi dengan pusat ataupun provinsi lain seperti DKI terkait angkutan umum massal atau Kawasan.